

CORAK HUBUNGAN SOSIAL MASYARAKAT MAJEMUK DI INDONESIA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN NASIONAL

Heddy Shri Ahimsa-Putra*)

Berbicara mengenai corak hubungan sosial masyarakat majemuk seperti di dalam kaitannya dengan proses pembangunan yang sedang berlangsung berarti membicarakan tentang perubahan-perubahan berbagai hubungan baik perubahan kuantitatif maupun perubahan kualitatif, sebagai akibat dari proses pembangunan tersebut. Dari perspektif analisis sosial-budaya hubungan sosial yang ada dalam suatu masyarakat bukan merupakan sesuatu yang berdiri sendiri, yang terlepas dari berbagai unsur dan kondisi dalam, tetapi merupakan suatu gejala yang terkait dengan berbagai unsur kondisi-kondisi di luarnya.

Suatu corak hubungan sosial pada dasarnya merupakan suatu pola interaksi antara seorang individu atau suatu kelompok dengan individu atau kelompok yang lain, dalam suatu masyarakat. Pengertian 'pola' atau 'corak' itu memiliki dua macam pengertian, yakni: aspek 'pola dari' dan 'pola bagi' (atau 'corak dari' dan 'corak bagi'). Perbedaan makna dua pola ini perlu ketahui, karena hubungan antara dua pola inilah yang melahirkan dinamika sosial dalam masyarakat. 'Pola dari' dapat kita artikan sebagai abstraksi yang dibuat oleh seorang pengamat atau peneliti atas dasar berbagai interaksi sosial yang terjadi antarindividu atau kelompok dalam masyarakat, dilihatnya, sedang 'pola bagi' merupakan tafsir, pemahaman, atau pengetahuan para pelaku mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan perilaku mereka, misalnya, mengenai norma-norma, nilai-nilai, situasi sosial, kategori, dan sebagainya, yang harus mereka perhitungkan dan perhatikan dalam perilaku tertentu.

*) Antropologi Budaya Fakultas Ilmu Budaya, Pusat Penelitian Kebudayaan dan Perubahan Sosial Universitas Gadjah Mada

Perubahan hubungan sosial pada dasarnya selalu terjadi dalam masyarakat, dalam soal kecepatan serta volume saja perubahan tersebut berbeda. Dalam tertentu, perubahan tersebut bisa lambat, sedang dalam masyarakat lain perubahan yang terjadi lebih cepat. Dalam konteks pembangunan yang sedang dilaksanakan di Indonesia sekarang ini, berbagai pola hubungan sosialmasyarakat dengan sendirinya mendapat pengaruhnya, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, dan dalam dua aspek ini kecepatan perubahan juga.

Perubahan hubungan sosial dalam berbagai masyarakat di Indonesia sebenarnya berlangsung terus menerus, semenjak dahulu kala, hanya saja kita mulai dapat mengetahui perubahan tersebut dengan lebih baik setelah adanya laporan-laporan atau deskripsi mengenai berbagai masyarakat di Indonesia, mengenai corak sosial di dalamnya, dinamikanya, serta berbagai perubahannya. Laporan deskripsi yang sistematis dan serius mengenai pola-pola hubungan sosial Indonesia ini mulai muncul setelah kedatangan orang-orang Belanda masa lalu, serta studi yang mendalam yang dilakukan oleh para ahli sejarah ahli antropologi.

Dari berbagai laporan dan

hasil penelitian yang pernah dilakukan kita ketahui bahwa perubahan corak hubungan sosial dalam masyarakat Indonesia sudah semenjak puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu.

Yang membedakannya dengan perubahan-perubahan yang terjadi di masa kini adalah dalam hal kecepatan dan volumenya. Perubahan yang terjadi kini antara lain karena berlangsungnya pembangunan (apa pun ini artinya) yang berlangsung cepat di berbagai bidang kehidupan membuat perubahan corak hubungan (baik secara kualitatif-kuantitatif) berlangsung dengan cepat pula.

Dilihat dari perspektif hubungan sosial, masyarakat Indonesia tidak hanya dalam soal suku bangsa dan budaya saja, tetapi juga dalam hubungan sosialnya, dan kemajemukan ini meningkat dengan cepat sejalan dengan pesatnya yang terjadi dalam masyarakat. Jika secara etnis masyarakat Indonesia tidak bertambah majemuk, namun secara relasi sosial kemajemukan tersebut meningkat, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Dalam makalah ini saya memandang kemajemukan masyarakat Indonesia dari pandang corak hubungan sosial, dan mencoba menguraikan corak yang ada di bidang kehidupan dalam masyarakat Indonesia serta be-

berapa perubahan terjadi di dalamnya, dan beberapa akibat yang ditimbulkannya dalam kehidupan masyarakat Indonesia di masa kini.

Beberapa Corak Hubungan Sosial Tradisional di Indonesia

Sebenarnya banyak sekali corak hubungan sosial yang terdapat dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, namun di sini saya hanya akan membatasi pembicaraan pada corak hubungan sosial yang relatif dominan dalam masyarakat tradisional di Indonesia pada masa yang lalu, yakni hubungan kekerabatan, hubungan ekonomi, hubungan keagamaan, dan hubungan politik, serta perubahan-perubahan yang terjadi dalam corak hubungan sosial tersebut, ketika masyarakat-masyarakat tradisional Indonesia bertemu dengan peradaban asing, terutama peradaban.

Corak Hubungan Dalam Sistem Kekerabatan

Salah satu hubungan antarindividu yang dominan dalam masyarakat "tradisional" adalah hubungan yang diatur oleh aturan, norma, serta nilai-nilai etnis yang menjadikan kategori-kategori sosial kerabat dan non-kerabat sebagai yang pokok dalam berinteraksi. Mereka yang tergolong kerabat seringkali dibeda-

kan menjadi dua macam, yakni kerabat yang diperoleh karena keturunan, dan mereka yang diperoleh lewat perkawinan. Aturan di balik berbagai interaksi antarkerabat ini berbeda antara suku bangsa satu dengan yang lain.

Di kalangan orang Batak misalnya, yang meruntut keanggotaan seseorang dalam kelompok kerabat tertentu (yang disebut marga) melalui garis laki-laki (patrilineal), kerabat baru yang diperoleh seorang pria dari perkawinannya dengan seorang gadis sangat penting artinya bagi diri dan kerabatnya. Kedudukan dekat si gadis, seperti misalnya saudara-saudara sekandung si gadis, tua, paman-paman dari pihak si gadis, mempunyai kedudukan yang sangat di mata si pria dan kerabat-kerabat dekatnya. Orang Batak beranggapan dari keluarga luas pihak si gadis inilah datangnya berkah spiritual. Kerabat pihak si gadis dianggap memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada pihak si pria, dan kerabat pria hampir tidak mungkin menolak setiap bantuan yang datang dari pihak kerabat si gadis, karena penolakan dapat mengakibatkan jatuhnya sanksi supernatural yang bisa sangat berat akibatnya. Sebaliknya kerabat-kerabat si pria ini mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dalam berhadapan

dengan kelompok-kelompok kerabat yang mendapatkan dari kelompok kerabatnya. Dari kelompok-kelompok kerabat yang mereka "beri" gadis inilah suatu kelompok kekerabatan (marga) tertentu dapat mengharapkan berbagai bantuan material, seperti tenaga, barang ataupun uang.

Jadi dalam masyarakat Batak individu-individu di situ pasti masuk dalam kelompok kekerabatan tertentu, dan hubungan mereka dengan individu-individu Batak lainnya didasarkan atas bagaimana mereka berhubungan satu dengan lain sebagai kerabat. Kelompok kerabat yang memberi gadis dianggap lebih daripada kelompok kerabat yang menerima gadis. Dari kelompok kerabat gadis inilah orang Batak dapat mengharapkan turunnya berkah supernatural, sedang berkah atau bantuan material mereka harapkan datang dari kelompok penerima gadis.

Kalau setiap individu Batak pasti masuk dalam suatu kelompok kekerabatan yang diruntut melalui garis laki-laki, pada masyarakat Minang peruntutan ini justru melalui garis wanita, sehingga masyarakat Minang dikenal sebagai masyarakat dengan sistem matrilineal. Dalam sistem ini dengan sendirinya menduduki posisi yang kuat da-

lam masyarakat, sehingga seorang laki-laki masyarakat Minang tradisional mempunyai tanggung-jawab yang besar terhadap anak-anak saudara perempuannya, jauh lebih besar daripada terhadap anak-anaknya sendiri. Anak-anaknya akan diperhatikan oleh paman mereka dari pihak, atau ipar laki-laki bapak mereka. Oleh karena itu hubungan seorang anak masyarakat Minang tradisional dengan pamannya sangat erat, lebih erat hubungan mereka dengan ayah mereka.

Corak hubungan kekerabatan seperti pada masyarakat Batak, yang berbeda corak hubungan pada masyarakat Minang, berbeda lagi dengan corak hubungan kekerabatan pada masyarakat Jawa, atau Makassar, atau Bali. Dalam masyarakat Makassar tidak dikenal garis pria saja atau wanita saja. Bagi mereka hubungan kekerabatan dapat mereka runtut melalui garis pria maupun wanita, sehingga kerabat dari pihak ibu sama statusnya di hadapan seorang individu dengan kerabat dari pihak ayahnya. Kerabat yang terdekat dari seorang individu selain saudara sekandungnya adalah sepupu-sepupunya, terutama sepupu sekali (*sampo sikali*), sepupu dua kali (*sampo pinruang*), dan sepupu tiga kali (*sampo*). Bagi seorang individu Makassar, setiap

sepupu yang sedang menghadapi masalah, harus ditolong jika dia memerlukan pertolongan. Menolak memberikan bantuan kepada kerabat yang sedang membutuhkannya akan dianggap sebagai atas hubungan kekerabatan yang ada, dan ini dapat mengundang hukuman sosial ataupun fisik yang sangat keras dan berat, seperti misalnya pembunuhan atas kerabat yang tidak bersedia menolong.

Dalam konteks masyarakat tradisional, di mana orang-orang yang ada di sekitar individu dianggap tidak ada yang lain, artinya semua dapat dianggap atau sebagai kerabat, entah itu lewat perkawinan, lewat keturunan, garis laki ataupun perempuan, interaksi yang didasarkan pada kategori-kategori kerabat tidaklah menjadi masalah. Semua individu dalam masyarakat boleh dan dianggap mengetahui berbagai macam aturan sosial yang ada berkenaan interaksi antarindividu. Dengan demikian interaksi sosial dapat berjalan dengan lancar. Hubungan sosial yang terbentuk merupakan hubungan yang harmonis. Kerjasama dengan mudah dibina dan berlangsung, sedang berbagai macam konflik dengan mudah diatasi, karena setiap individu memiliki acuan kerangka, norma dan nilai yang sama.

Masalah baru akan muncul

ketika dalam masyarakat mulai terjadi perubahan saja, karena masuknya sebuah pabrik atau industri, atau toko, di sebuah desa, kampung, atau lokasi tertentu, tentu akan mengundang orang-orang berdatangan ke daerah tersebut. Di sini muncul individu-individu baru tidak dapat dianggap 'kerabat'. Para pendatang adalah orang luar yang di luar jangkauan aturan-aturan kekerabatan. Pola hubungan sosial baru akan muncul di situ, dan dari sana lahirlah kemudian berbagai masalah dengan interaksi antar mereka yang merupakan penduduk asli suatu lokasi, dengan mereka yang merupakan kaum pendatang.

Corak Hubungan Dalam Sistem Ekonomi

Hubungan ekonomi dalam masyarakat tradisional di mana uang belum merupakan alat tukar yang dominan banyak berupa hubungan tukar-menukar, sedang dalam ekonominya, pembagian kerja lebih banyak didasarkan atas perbedaan kelamin. Dalam masyarakat semacam ini, idiom-idiom yang berasal dari hubungan kekerabatan biasanya dipakai atau masuk dalam berbagai kegiatan ekonomi. Dalam bahasa yang agak ideal, ekonomi masyarakat semacam ini sering disebut ekonomi 'kekeluargaan'. Ideologi

kekeluargaan seperti ini memang masih kehidupan masyarakat Indonesia, terutama yang hidup di daerah pedesaan atau di pelosok-pelosok yang jauh dari kota. Dalam masyarakat di mana kegiatan ekonomi masih didominasi oleh kegiatan menukar (*barter*), atau 'ideologi' ekonomi *barter* masih mendominasi aktivitas ekonomi secara keseluruhan, perhitungan yang *njlimet* mengenai nilai suatu komoditi yang dipertukarkan tidak dapat dilakukan, sehingga orang pun tidak bersikap sangat ketat dalam pertukaran. Dalam ekonomi semacam ini proses menawar menjadi sangat penting. Siapa dapat melakukan tawar-menawar dengan baik, sesuatu yang melibatkan faktor kepribadian para pelaku, akan dapat keuntungan yang besar. Jika dia penjual, dia dapat menjual dengan tinggi, sedang kalau dia pembeli, dia dapat memperoleh barang dengan yang lebih murah dibanding orang lain. Interaksi sosial antara penjual pembeli seringkali tidak lepas dari hubungan antara mereka sebagai tetangga, sebagai kerabat, sebagai kenalan dan sebagainya, sehingga perhitungan 'ekonomis' tidak selalu diterapkan dalam kegiatan ekonomi. Contoh kongkrit dari kekeluargaan yang masuk dalam kegiatan ekonomi adalah kata-kata pedagang Jawa

"tuna sathak, bathi sanak". Kata-kata ini jelas lebih menekankan relasi kekerabatan daripada keuntungan ekonomis.

Relasi lain yang dominan dalam kegiatan ekonomi adalah yang berdasarkan kerja atas dasar jenis kelamin. Ini tampak terutama dalam ekonomi-tangga, di mana biasanya wanita bertugas menyelesaikan berbagai pekerjaan dalam rumah (*domestik*) seperti misalnya, memasak, mencuci pakaian, memomong, membersihkan rumah, dan sebagainya, sedang pria berkewajiban mencari di luar rumah. Penghasilan rumah-tangga sebagian besar umumnya berasal si suami. Dalam situasi semacam ini ketergantungan isteri pada suami, wanita pada pria menjadi besar. Demikian juga halnya dengan anak-anak masyarakat tradisional Indonesia, yang sebagian besar hidup dari kegiatan, ketergantungan anggota keluarga pada seorang pria sebagai kepala rumah-tangga, pada umumnya sangat besar. Anak-anak yang telah dewasa tidak selalu segera melepaskan diri dari ketergantungan pada orangtua mereka, bahkan juga setelah menikah. Di lain pihak, di sini suami dan anak-anak laki-lakinya yang telah dewasa biasanya menjadi tulang-punggung keluarga mereka. Situasi seperti ini kaum wanita pada umumnya

berada pada posisi yang lebih lemah, karena mereka lebih tergantung pada kaum pria, sehingga kaum pria juga lebih dapat memaksakan kehendak mereka pada kaum wanita, daripada sebaliknya. Selain itu, berbagai aturan, norma serta nilai yang berlaku dalam masyarakat umumnya memang juga menempatkan kaum wanita dalam kedudukan lebih rendah daripada kaum pria.

Hubungan semacam ini tentu tidak merupakan masalah ketika warga masyarakat yang bersangkutan masih belum mengenal sistem pembagian kerja yang baru, juga lebih rumit. Namun ketika masyarakat mulai mengalami perubahan, di berbagai lowongan pekerjaan yang baru terbuka bagi kaum wanita, maka berbagai masalah baru tentu muncul, karena di sini akan terjadi perubahan corak sosial, yang sebenarnya juga merupakan hubungan kekuasaan antar-individu sebagai warga suatu masyarakat.

Corak Hubungan Dalam Sistem Kepercayaan

Salah satu ciri penting dari hubungan sosial dalam masyarakat tradisional bidang kehidupan keagamaan mereka adalah masih kuatnya pengaruh pemimpin dalam kehidupan sehari-hari umatnya. Hal ini tidak terlepas

dari kenyataan bahwa 'sistem kepercayaan' atau agama dalam masyarakat tradisional memang dipandang sebagai sebuah sistem yang menyeluruh, yang menyelinap dan merembes, membasahi semua bidang kehidupan manusia. Selain itu, masih relatif mereka yang mengetahui soal-soal keagamaan, karena langkanya pendidikan keagamaan, membuat pengetahuan tentang agama seolah-olah dapat menjadi individu-individu tertentu, dan ini membuat mereka merupakan individu-individu yang berpengaruh dalam masyarakat.

Selain itu, dalam masyarakat tradisional yang umumnya relatif tertutup, tersebut biasanya juga bersifat homogen, artinya para warganya menganut sistem kepercayaan yang relatif sama, menjalankan berbagai ritual yang, dan mengikuti berbagai aturan keagamaan yang sama pula, sehingga berbagai ritual serta interaksi sosial yang berlandaskan pada aturan-aturan agama berjalan dengan lancar, tanpa gangguan.

Ciri ketertutupan, homogenitas, serta masih kuatnya 'monopoli' pengetahuan keagamaan dalam masyarakat yang tradisional, membuat tokoh-tokoh agama boleh dikata tidak mempunyai pesaing dalam kedudukan mereka sebagai pimpinan

dalam masyarakat. Selain pemimpin keagamaan, mereka juga merupakan pimpinan politik warga masyarakat mereka. Hal semacam ini sulit berlaku lagi ketika masyarakat tersebut mulai berubah, ketika pembagian kerja mulai bertambah rumit njlimet, pengetahuan dan spesialisasi di bidang keagamaan juga semakin, dan sistem politik juga bertambah kompleks, sehingga terjadi pemisahan dalam kedudukan pemimpin keagamaan dan pemimpin dalam bidang 'pemerintahan'.

Dalam situasi semacam ini monopoli pengetahuan agama menjadi hampir tidak, demikian juga monopoli pengaruh atau kepemimpinan dalam masyarakat, oleh karena itu pemimpin agama kemudian bukanlah satu-satunya tokoh yang berpengaruh dalam masyarakat. Individu-individu lain yang juga memiliki pengetahuan agama yang luas, yang penting artinya bagi kelangsungan hidup para warga, atau memiliki kemampuan lain yang diperlukan masyarakat kini juga menjadi pemimpin. Persaingan dapat terjadi antar-pemimpin dalam memperebutkan pengaruh mereka dalam masyarakat. Di sini mulai terjadi perubahan dalam hubungan antarwarga masyarakat.

Corak Hubungan Dalam Sistem Politik

Dalam sistem politik tradisional, kepemimpinan didasarkan pada kharisma pemimpin, atau pada garis keturunan, atau pada kontrol atas seperangkat nilai tertentu yang dipandang penting bagi kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Kharisma atau daya-tarik seorang pemimpin dianggap melekat pada diri si pemimpin, sehingga ketaatan para pengikut terhadap pemimpinnya lebih didasarkan pada pandangan pengikut tentang diri pribadi si pemimpin, bukan pada sistem politik yang berlaku. Kharisma seseorang seringkali terkait erat dengan simbol-simbol tertentu, tetapi bisa juga karena prestasinya dianggap luar biasa. Selain kharisma, garis keturunan juga merupakan dasar legitimasi posisi sebagai pemimpin dalam suatu masyarakat. Walaupun mungkin secara pribadi si pemimpin tidak memiliki kharisma yang kuat, ataupun prestasi luar biasa, namun garis keturunan yang dimilikinya dapat membuat orang taat kepada segala perintahnya, atau membuatnya dipilih untuk duduk sebagai pemimpin. Ini tampak misalnya dalam sistem politik tradisional di Jawa, yang terdapat di Yogyakarta dewasa ini, atau sistem politik tradisional yang pernah berlaku di Sulawe-

si Selatan, atau sistem politik tradisional kerajaan yang pernah muncul di berbagai tempat di kawasan Nusantara. Seperangkat atau suatu simbol yang dipandang penting atau besar perannya dalam kehidupan suatu masyarakat juga dapat menjadi dasar legitimasi kepemimpinan seseorang di dalamnya. Wujud dari simbol-simbol ini bisa berbagai macam, seperti misalnya benda pusaka, tanah, atau peralatan lain yang penting kehidupan warga masyarakat yang bersangkutan. Bisa berupa benda yang memiliki fungsi atau nilai ekonomis, bisa pula tidak. Legitimasi yang semacam juga pernah berlaku di kalangan orang Jawa dan orang Bugis-Makassar di Sulawesi Selatan di masa lalu.

Pada masyarakat Makassar tradisional misalnya, mereka yang mempunyai kalompowang atau semacam pusaka, merupakan individu-individu yang berpengaruh masyarakat, karena kalompowang tersebut dianggap dapat mempengaruhi kehidupan manusia di dunia, dan hanya si pemilik atau pemegang kalompowang yang dapat berkomunikasi dengan 'kekuatan supernatural' yang ada di dalam. Monopoli kemampuan dalam berkomunikasi dengan kekuatan suatu kalompowang inilah yang membuat individu tersebut dapat menjadi orang yang berpen-

garuh dalam masyarakat.

Selain itu, dalam masyarakat Makassar dan Bugis tradisional, seperti juga terdapat dalam masyarakat tradisional Indonesia lain yang mengenal sistem pemerintahan kerajaan, keturunan merupakan faktor penting yang turut menentukan sah tidaknya seseorang menduduki suatu kedudukan sebagai pemimpin. Walaupun secara fisik individu tersebut tidak memenuhi syarat untuk menjadi, namun faktor 'darah raja' yang dianggap ada dalam tubuhnya, membuat ditaati oleh orang lain, karena 'darah raja' ini dianggap telah mempunyai kekuatan tersendiri yang dapat menentukan sejahtera tidaknya rakyat komunitas pengikutnya.

Ketika masyarakat-masyarakat tradisional Indonesia mengalami perubahan, hal yang mendasari kekuasaan atau kepemimpinan seseorang dalam masyarakat mulai dipertanyakan kebenarannya. Pemimpin tradisional mulai kehilangan kekuasaan mereka, karena munculnya berbagai simbol baru dalam masyarakat yang memiliki relevansi sosial lebih besar dalam kehidupan yang baru tidak mereka miliki. Dalam situasi seperti ini, perubahan corak hubungan pemimpin dengan pengikut tidak dapat dihindarkan lagi.

Corak Hubungan Sosial dan Pembangunan di Indonesia

Proses pembangunan yang sebenarnya boleh dikatakan sudah berlangsung semenjak Indonesia mulai memproklamkan kemerdekaannya, semenjak bangsa Indonesia mulai membenahi berbagai macam sistem dalam kehidupan mereka, telah melahirkan berbagai hubungan sosial baru dalam sistem sosial di Indonesia, yang mengubah seluruh konfigurasi sistem sosial yang ada, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Munculnya negara Indonesia yang merdeka, yang melahirkan negara kesatuan sistem politik yang berbeda dengan berbagai macam sistem politik tradisional yang pernah ada, karena sistem 'negara' ini dibangun mengikuti model Barat, dengan sendirinya menuntut adanya corak hubungan sosial baru antara pemimpin dengan pengikut atau rakyat. Dalam sejarah politik Indonesia, kita melihat bagaimana bangsa Indonesia bereksperimen dengan berbagai macam politik ala Barat, dengan berbagai dampak positif dan negatifnya. Meskipun kini sistem politik 'negara' boleh dikatakan sudah lebih mantap, daripada beberapa tahun yang lalu, hal itu tidak berarti sistem ini telah dapat berjalan lancar tanpa hambatan. Dalam sistem politik yang baru ini kita melihat

bahwa 'idealnya' pemilihan dan pengangkatan seseorang untuk menduduki suatu status dengan peranan tertentu dalam sistem tersebut berlangsung secara 'rasional', artinya didasarkan kriteria yang mengutamakan kemampuan dan pendidikan yang dimiliki oleh individu, bukan atas dasar keturunan ataupun pemilikannya atas suatu daya tertentu, yang tidak relevan dengan status yang akan ditempatinya. Hubungan antara seorang individu dengan individu lain dalam sistem politik yang baru juga berbeda dengan corak hubungan dalam sistem politik yang lama. Kalau dalam sistem politik tradisional hubungan antara pemimpin dan pengikutnya bersifat pribadi, maka dalam sistem politik yang baru hal semacam itu lagi sepantasnya diberlakukan.

Dalam sistem politik masyarakat Indonesia yang tradisional, relasi politik dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat lepas dari relasi kekerabatan yang dalam masyarakat, sehingga pengambilan keputusan dalam sistem politik itu tidak selamanya didasarkan atas pertimbangan kepentingan 'umum'. Macam kepentingan kerabat seorang pemimpin atau pejabat dalam sistem politik tradisional biasanya sangat mempengaruhi pengambilan keputusan yang kehidupan orang banyak. Gejala

semacam inilah yang sering dikatakan sebagai nepotisme, dan sangat dicela dalam sistem politik 'modern', yang dari Barat.

Selain dalam lapangan politik, perubahan corak hubungan sosial juga terjadi karena masuknya sistem pendidikan Barat yang memiliki berbagai aturan, dan nilai yang berbeda dengan sistem pendidikan yang berlaku dalam masyarakat Indonesia tradisional. Sistem pendidikan yang kini kita kenal memang berasal dari sistem yang ada dalam masyarakat kita, oleh karena itu, pola hubungan sosial yang terdapat dalam pranata pendidikan juga tidak selamanya sesuai dengan pola-pola hubungan sosial masyarakat tradisional. Status dan peranan guru, kepala sekolah, penilik, dan sebagainya berbagai relasinya satu sama lain, merupakan unsur-unsur baru bagi masyarakat tradisional. Kedatangan sistem pendidikan dengan berbagai macam unsurnya ini mau tidak mau mengubah konfigurasi pola hubungan sosial yang telah sebelumnya. Pendidikan juga melahirkan individu-individu dengan pengetahuan baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat baru, karena pendidikan memang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan individu-individu yang lebih menjalankan ber-

bagai peran baru dalam sistem status sosial yang baru. Kemudian golongan sosial baru dalam masyarakat yang menjadi lebih berpengaruh daripada beberapa golongan yang telah ada sebelumnya, berkat kemampuan yang mereka miliki, serta posisi strategis yang mereka duduki dalam masyarakat. Dalam situasi seperti ini maka konstelasi corak hubungan sosial antardengan sendirinya lantas berubah, dan ini menimbulkan berbagai dampak lanjut, baik yang positif maupun negatif.

Munculnya daerah-daerah baru yang menjadi pusat pemerintahan daerah, meningkatnya sarana transportasi, serta munculnya berbagai lapangan kerja karena pembangunan di berbagai macam bidang membuat masyarakat Indonesia yang semula relatif tertutup, kini menjadi masyarakat yang lebih terbuka. Banyak orang pergi ke kota, karena terbukanya kerja baru di sana, baik di sektor formal maupun informal. Banyak desa yang berubah menjadi pusat perkotaan baru karena kebijakan tertentu ditempuh oleh pemerintah daerah setempat. Proses perpindahan penduduk makin lancar dan cepat, sehingga homogenitas komunitas yang dulu mudah dipertahankan kini tinggal menjadi angan-angan.

Sebagai contoh misalnya, se-

buah kampung di Yogya, yang pada kira-kira tiga puluh tahun yang lalu (tahun 60'an) penduduknya masih mengenal satu sama lain dengan baik, dan satu sama lain masih mempunyai ikatan kekerabatan, kini berubah menjadi sebuah kampung yang penuh dengan anak-anak muda pendatang, baik laki maupun perempuan, yang berada di Yogyakarta dengan berbagai macam, entah untuk belajar, bekerja, berdagang atau melakukan kegiatan lainnya. Kini kampung tersebut menjadi sangat heterogen penduduknya. Banyaknya yang tinggal di kampung tersebut diiringi dengan juga semakin banyaknya penduduk asli kampung tersebut yang pergi ke kota-kota lain di Indonesia dengan berbagai macam tujuan. Situasi semacam ini tentu melahirkan berbagai macam corak hubungan sosial baru, yang semula tidak dikenal. Misalnya saja, kini muncul relasi sosial antara pemondok dengan pemilik kamar, relasi sosial sesama pemondok, relasi sosial antarmereka yang berbeda latar belakang suku bangsanya, berbeda agamanya, berbeda status sosialnya, berbeda, dan sebagainya.

Beberapa Dampak Perubahan Corak Hubungan Sosial

Berbagai corak hubungan so-

sial baru yang muncul dalam masyarakat Indonesia yang baru, seperti telah penulis katakan, tentu mengubah konfigurasi hubungan yang telah ada. Selain itu, karena perubahan yang ada berlangsung relatif cepat, maka muncul berbagai macam masalah sosial yang pada dasarnya bermuara pada kesenjangan yang terjadi antara aspek 'pola bagi' dan 'pola dari' terdapat dalam hubungan antarindividu.

Aspek 'pola dari' lebih cepat mengalami perubahan, karena relasi sosial sebagai bagian dari realitas empiris memang lebih mudah mengalami perubahan. Halnya dengan aspek 'pola bagi' yang merupakan aspek normatif, evaluatif, dan moral dari relasi sosial yang ada. Aspek ini lebih lambat dalam berubah, karena memang aturan, norma, sistem nilai baru, yang sesuai tidak segera muncul mengiringi perilaku-perilaku yang ada. Di sinilah terjadi kesenjangan, yang tidak kita sebut sebagai kesenjangan sosial, tetapi kesenjangan, dan keadaan semacam ini sudah dilihat oleh seorang ahli antropologi, yakni Clifford Geertz, yang melakukan penelitian lapangan di sebuah kecil di Jawa Timur, Pare.

Kesenjangan budaya dapat muncul di sebuah kantor pemerintah, di sebuah kampung, dalam kehidupan keluarga dan se-

bagainya. Kesenjangan budaya ini kemudian melahirkan gesekan-gesekan sosial, yang terjadi karena paham. Kesalahpahaman muncul karena pihak pihak yang berinteraksi menggunakan kerangka acuan yang berbeda dalam interaksi yang berlangsung, dan perbedaan ini muncul karena makin meningkatnya heterogenitas sosial dalam masyarakat. Bilamana kesenjangan budaya ini tidak segera dapat diatasi dengan menciptakan sebuah kerangka acuan bersama yang ditaati oleh para warga masyarakat semakin meningkat heterogenitasnya tersebut, maka berbagai macam gesekan yang kecil-kecil hingga persaingan dan konflik yang menyangkut lebih warga masyarakat akan semakin mudah terjadi, yang pada gilirannya akan integrasi sosial yang telah tercipta.

Berbagai bentuk kesenjangan budaya dapat kita temui contohnya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari yang kecil-kecil hingga yang besar-besar. Mulai yang remeh-remeh, yang hanya menyangkut satu atau dua orang individu yang besar-besar, yang melibatkan puluhan, ratusan, bahkan ribuan warga. Seorang pimpinan kantor yang mengangkat seorang pegawainya ke posisi yang lebih tinggi karena pegawai tersebut adalah tetangganya, atau kerabatnya, bukan

karena kemampuan dan cara kerjanya di kantor, merupakan suatu dari gejala 'kesenjangan budaya'.

Seorang pejabat yang menunjuk suatu perusahaan untuk menangani sebuah pemerintah dengan nilai milyaran rupiah, bukan karena pertimbangan mutu perusahaan, tetapi karena perusahaan yang bersangkutan adalah milik, anaknya, atau sesama anggota partai politik, adalah juga suatu atau wujud dari suatu kesenjangan budaya. Masih banyak lagi contoh lain yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari di sekeliling kita. Memang, dasarnya masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang kini tengah dilanda budaya. Ini semua terjadi karena perubahan fisik yang berlangsung cepat, yang melahirkan corak-corak hubungan sosial baru, yang tidak selalu diiringi dengan lahirnya aturan, norma serta nilai-nilai yang sesuai dengan berbagai hubungan sosial yang baru tersebut.

Penutup

Dalam makalah ini penulis mencoba untuk memaparkan beberapa corak hubungan yang pernah ada dalam masyarakat tradisional di Indonesia. Corak hubungan ini kini tengah mengalami perubahan, baik secara

kualitatif maupun kuantitatif, karena berbagai perubahan yang tengah melanda masyarakat Indonesia umumnya. Dengan sendirinya, maka konfigurasi berbagai relasi sosial dijuga mengalami perubahan. Perubahan ini telah melahirkan suatu bentuk kesenjangan, yakni kesenjangan budaya, yang dapat kita rumuskan sebagai sesuaian antara sistem relasi sosial yang ada dalam suatu masyarakat sistem norma dan nilai yang seharusnya menjadi kerangka acuan sistem sosial tersebut.

Oleh karena perubahan berlangsung dengan cepat, maka

perubahan pada tingkat relasi sosial juga berlangsung dengan cepat, sedang perubahan pada tatanan, norma dan nilai, tidak dapat berlangsung secepat perubahan pada tatanan tersebut. Akibatnya mudah kita duga, yakni semakin lebarnya jurang kesenjangan budaya yang ada dalam suatu masyarakat. Bilamana kesenjangan ini tidak dapat diatasi, maka gesekan-gesekan sosial akan semakin sering terjadi, pada gilirannya akan melahirkan konflik-konflik sosial yang lebih besar, serius, serta lebih sulit diatasi.